

**IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BELORO
KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Deah Febriyani, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 11, Nomor 1, 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi PNPM Mandiri Pedesaan dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai

Pengarang : Deah Febriyani

NIM : 1502015042

Program : S1 Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 24 Maret 2023

Pembimbing II,



Dr. Fajar Apriani, M.Si.

NIP 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL S1 ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	 Koordinator Prodi S1 Administrasi Publik  Dr. Fajar Apriani, M.Si. NIP 19830414 200501 2 003
Volume	: 11	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2023	
Halaman	: 222-233	

IMPLEMENTASI PNPM MANDIRI PEDESAAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA BELORO KECAMATAN SEBULU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Deah Febriyani ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Target riset ini merupakan untuk mengenali dan menggambarkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pedesaan Mandiri dalam pembangunan infrastruktur Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Juga untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Katanegara dalam pembangunan infrastruktur. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu faktor-faktor penghambat dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penelitian ini key informan adalah Kepala Desa Beloro dan informasi lainnya adalah skretaris Desa Beloro. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan rekaman, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Beloro sudah berjalan dengan cukup tertib dan masyarakat cukup antusias dengan adanya program tersebut. Namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program PNPM di Desa Beloro khususnya dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya yaitu sarana tertentu yang kurang memadai seperti penerangan jalan di Desa Beloro. bertanggung jawab atas program PNPM ini khususnya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Beloro agar program tersebut dapat berjalan dengan efisien tanpa adanya kendala.

Kata Kunci : *Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Pedesaan*

Pendahuluan

Pembangunan Indonesia adalah suatu usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, upaya untuk mewujudkan pertumbuhan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: dfebriani769@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

ekonomi riil dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada, dan upaya pengentasan kemiskinan dalam masyarakat yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakatan bangsa dan negara. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor politik, sektor Ekonomi, dan sektor budaya. Guna mencapai semua itu perlu adanya peran negara dan pelaksanaan kebijakan politik.

PNPM Mandiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan.

Pendanaan dari sumber luar negeri, termasuk hibah dan pinjaman, selain memenuhi ketentuan yang berlaku, juga merupakan co-financing, sehingga berbagai sumber pendanaan dapat dimanfaatkan secara optimal. Sumber pendanaan pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut di atas adalah untuk komponen proyek, yaitu pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat (BLM), peningkatan kapasitas pemerintah dan aktor lokal, serta bantuan pengelolaan dan pengembangan proyek. Komponen BLM harus memperhatikan aspek alokasi dana dan daftar negatif yang diidentifikasi oleh masing-masing program.

PNPM Mandiri Pedesaan dicanangkan pemerintah telah terlaksana di beberapa beberapa wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Kutai Kartanegara, salah satunya di Kecamatan Sebulu, khususnya pada Desa Beloro. Desa Beloro merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang terindikasi sebagai desa yang membutuhkan perhatian pemerintah agar desa ini dapat berkembang dan bisa mengelola sumberdaya alamnya maupun sumberdaya manusia.

Program Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Saat PNPM Mandiri, seluruh warga masyarakat terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, melalui proses perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan penggunaan dana, sesuai dengan kebutuhan prioritas tertinggi desanya. Melalui pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan alokasi anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD). Melalui kemiskinan yang melibatkan untuk menanggulangi kemiskinan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi. Kemudian 3% dialokasikan untuk tambahan kepada desa-desa yang berstatus tertinggal.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri belum sepenuhnya mengubah wajah desa Beloro belum adanya semenisasi jalan Beloro-Rapak Lambur (sawitan) dan jalan Beloro sampai sebulu modern, hanya sebagian jalan yang sudah menjadi beton sedangkan jalan dari penyebrangan menuju Desa Beloro masih didominasi jalan tanah dan apabila memasuki musim hujan keadaan

jalan menjadi berlumpur dan sangat licin dan juga minimnya penerangan jalan di Desa Beloro sehingga ketika malam hari jalan menjadi gelap.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan inti permasalahan yang menjadi pokok bahasan utama penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam pembangunan infrastruktur Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara?

Kerangka Dasar Teori *Kebijakan Publik*

Dye dalam Kadji (2015:9) memberikan pengertian dasar tentang kebijakan publik dengan menyatakan bahwa *public policy is whatever governments choose to or not to do*. Kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Masih senada dengan Dye, Edwards III dan Sharkansy, Frederick dalam Idris (2015:7) Mengatakan adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diajukan oleh seseorang, sekelompok orang yang terkait dengan adanya hambatan tertentu di lingkungan tertentu.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kebijakan publik dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan publik, dan kebijakan publik adalah perilaku pemerintah yang memilih untuk menerapkan atau tidak menerapkan alternatif-alternatif di kalangan masyarakat.

Implementasi Kebijakan Publik

Lester dan Stewart pada Winarno (2002:101-102) menjelaskan bahwa penegakan kebijakan secara luas didefinisikan sebagai indera manajemen hukum di mana berbagai aktor, organisasi, proses, serta grup etnis bekerja sama buat mengimplementasikan kebijakan guna mencapai dampak serta tujuan.

Menurut Darwin dalam Widodo (2011: 89), setidaknya terdapat empat hal krusial yang perlu disiapkan buat proses implementasi, yaitu: pemanfaatan sumber daya, partisipasi orang atau grup pada implementasi, interpretasi, manajemen proyek dan penyampaian layanan dan Webster pada Widodo (2011: 86) mendefinisikan implementasi menjadi penyediaan sarana pelaksanaan (*providing a means of doing something*) buat membuat dampak simpel (berpengaruh pada/mempengaruhi sesuatu). Implementasi berarti menyediakan sarana buat melaksanakan kebijakan dan mempunyai efek/akibat di suatu hal eksklusif.

Sebagai akibatnya dapat di pahami bahwa pendapat tersebut bisa diambil suatu kesimpulan pengertian bahwa implementasi artinya proses yang melibatkan asal yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasi yang dilakukan

pemerintah atau partikelir. Pelaksana kebijakan merupakan suatu aktivitas buat menimbulkan akibat (hasil), dampak (outcomes) dan manfaat (benefit), serta dampak (impacts) yg dapat dinikmati sang gerombolan target (target groups).

Berikut adalah dijabarkan mengenai proses implementasi suatu kebijakan publik yang mencakup termin interpretasi (interpretation), pengorganisasian (to organized) serta tahap software (application):

1. Tahap interpretasi (interpretation), merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat teknis operasional.
2. Termin pengorganisasian (to organized), lebih mengarah di proses kegiatan pengaturan serta penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, penetapan anggaran, penetapan sarana dan prasarana apa yg akan diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan rapikan kerja dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksana kebijakan.
3. Tahap aplikasi (application), merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realita konkret.

PNPM Mandiri Pedesaan

Adapun pengertian PNPM yang di jelaskan pada pedoman umum PNPM, PNPM mandiri artinya acara nasional dalam wujud kerangka kebijakan menjadi dasar serta acuan pelaksanaan acara-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan rakyat. PNPM berdikari dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system dan prosedur dan mekanisme program, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulant buat mendorong prakarsa serta penemuan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (Sekreteriat pedoman PNPM, 2007:11)

Tujuan dan Prinsip-Prinsip PNPM Mandiri Pedesaan

Tujuan awam PNPM sudah ditetapkan pedoman umum PNPM yaitu meningkatnya kesejahteraan serta kesempatan kerja masyarakat miskin secara berdikari. Sedangkan secara khusus tujuan PNPM yaitu:

- a) Meningkatnya partisipasi semua warga , termasuk masyarakat miskin, grup wanita, komunitas norma terpencil serta gerombolan rakyat lainnya yang rentan serta seringkali terpinggirkan ke pada proses pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan.
- b) Meningkatnya kapasitas kelembagaan rakyat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- c) Meningkatnya kapasitas pemerintah pada memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama rakyat miskin melalui kebijakan, acara serta panganggaran yg berpihak di rakyat miskin.
- d) Meningkatnya sinergi masyarakat, Pemerintah Daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi warga serta grup peduli lainnya, buat mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

- e) Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian warga serta kapasitas Pemerintah Daerah serta grup peduli setempat pada menanggulangi kemiskinan pada daerahnya.
- f) Meningkatnya modal social masyarakat yang berkembang sesuai menggunakan potensi sosial dan budaya dan buat melestarikan kearifan lokal.
- g) Meningkatnya penemuan dan pemanfaatan teknologi sempurna guna, gosip serta komunikasi pada pemberdayaan masyarakat. (Sekretariat panduan PNPM, 2007:11)

Pada panduan UmumPNPM mengemukakan bahwa PNPM mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: (a) Bertumpu pada pembangunan manusia, (b) Berorientasi pada rakyat miskin, (c) Partisipasi, (d) swatantra, (e) Desentralisasi, (f) Kesetaraan serta keadilan gender, (g) Demokratis, (h) Transparansi serta Akuntabel, (i) Prioritas, (j) kolaborasi, (k) Keberlanjutan, (l) Sederhana. (Sekretariat pedoman PNPM, 2007:12-13)

Pemberdayaan Masyarakat

Averroes dalam Mardikanto dan Soebiato (2015:44) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat (communiyy empowerment) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat (community development). Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian community development dan community empowerment, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto dalam Mardikanto dan Soebiato (2015:45) menggunakan pemberdayaan warga (a) menjadi upaya yg disengaja buat memfasilitasi rakyat lokal pada merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yg dimiliki melalui collective action serta Netwoking sebagai akibatnya di akhirnya mereka memiliki kemampuan serta kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial (b) pada pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat adalah proses buat memfasilitasi serta mendorong rakyat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan sebagai pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

asal berbagai definisi yang telah dikemukakan para pakar di atas bisa disimpulkan bahwa pemberdayaan warga merupakan upaya buat menaikkan kapsitas rakyat, baik secara individu atau secara grup, dalam memecahkan aneka macam persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Pembangunan Infrastruktur

Raharjo (dalam Mardikanto serta Soebiato, 2015:2) istilah pembangunan yang biasa digunakan pada bahasa indonesia, dewasa ini sudah semakin berkembang menjadi terjemahan dari beragam istilah asing, sebagai akibatnya terkadang mengandung kerancuan pengertian. Pembangunan pada kehidupan sehari-hari, dapat dipergunakan sebagai terjemahan atau padana kata: development, growth and change, modernization, atau bahkan jua progress.

Pembangunan menurut Riyadi (dalam Mardikanto serta Soebiato, 2015:tiga) mengatakan adanya beragam rumusan yg dikemukakan oleh banyak

pihak, tetapi kesemuanya itu mengarah kepada suatu kesepakatan bahwa: Pembanguna ialah suatu perjuangan atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu warga (dan individu-individu pada dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Pembanguna infrastruktur adalah galat satu aspek penting dan vital buat meningkatkan kecepatan proses pembangunan nasional maupun regional. Pembangunan infrastruktur yg sinkron menggunakan kebutuhan daerah dibutuhkan mampu meningkatkan perekonomian daerah tadi serta wilayah sekitarnya. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan sebagai akibatnya pada jangka panjang eksistensi infrastruktur harus sesuai di prinsip- prinsip akuntabilitas, transparansi serta memperhatikan aspek efesiensi serta keadilan.

Definisi Konsepsioanal

Definisi konsepsional digunakan penulis untuk menjelaskan secara rinci tentang judul yang diambil oleh penulis agar mempermudah dalam memahami maksud pembahasan ini. Sehingga dapat memberikan suatu gambaran jelas dan sistematis tentang penelitian yang dilakukan. Berkenaan dengan penelitian ini, penulis mendefinisikan implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) dalam infrastruktur pembangunan adalah pelaksanaan atau penerapan dari program yang dilakukan oleh Lembaga.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai terhadap riset adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka fokus penelitian yang di ambil dalam penelitian ini adalah

1. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam pembangunan infrastruktur yang meliputi indikator sebagai berikut:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan
 - b. Sumberdaya
 - c. Komunikasi antar organisasi dan petugas pelaksana
 - d. Karakteristik agen pelaksana
 - e. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
 - f. Sikap para pelaksana
2. Kendala yang menghambat implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Kepala Desa Beloro Kecamatan Sebulu dan Sekertaris Desa Beloro, Ketua RT, serta Masyarakat. Sedangkan Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari buku referensi atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah menjadi (a) Penelitian Kepustakaan, (b) Teknik Observasi, (c) Teknik Wawancara, (d) Teknik Dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah indera analisis data contoh interaktif, dimana dalam analisis data kualitatif ada 3 alur aktivitas yang secara bersamaan: (1) Kondensasi data, (2) Penyajian data, serta (3) Penyimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian dan pembahasan

Implementasi PNPM-MP dalam pembangunan Infrastruktur Desa Beloro

Dengan hasil perolehan data primer mengenai Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam pembangunan infrastruktur Desa Beloro, akan dibahas sebagai berikut:

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Van Meter serta Vam Horn pada Suharno (2013:176) baku dan sasaran kebijakan harus kentara serta terukur sebab ketidak kejelasan baku dan sasaran kebijakan berpotensi buat mengakibatkan multi interpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada siltnya implementasi kebijakan. Berkaitan dengan Implementasi PNPM-Mandiri Pedesaan di Desa Beloro dapat diketahui bahwa kebijakan dari program tersebut diarahkan pada peningkatkan kualitas hidup dan tercapainya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat miskin pedesaan di Desa Beloro. Sehingga dengan terlaksananya program tersebut dengan baik akan tersedianya sarana dan prasaran yang memadai dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di Desa Beloro.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berkaitan dengan Implementasi PNPM-Mandiri Pedesaan di Desa Beloro dapat diketahui bahwa kebijakan dari program tersebut diarahkan pada peningkatkan kualitas hidup dan tercapainya kesejahteraan serta kemandirian masyarakat miskin pedesaan di Desa Beloro. Sehingga dengan terlaksananya program tersebut dengan baik akan tersedianya sarana dan prasaran yang memadai dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di Desa Beloro.

b. Sumberdaya Manusia

Dalam pembahasan ini sumberdaya manusia yang berupa perangkat desa dan masyarakat yang di Pekerjakan di sebuah organisasi yaitu sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sumberdaya insan merupakan keliru subsatu penekanan penelitian yang dipergunakan untuk mengetahui tentang implementasi program Nasional Pemberdayaan warga mandiri Pedesaan pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Beloro Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

berdasarkan akibat penelitian Implementasi PNPM-MP pada Desa Beloro, sumberdaya manusia yang menjadi faktor terpenting pada menjalankan program PNPM belum terlaksana menggunakan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman pegawai untuk menjalankan Program tersebut. Seharusnya ditunjang

oleh adanya para staf atau tim pelaksana yang lebih paham untuk memberikan sosialisasi kepada para pegawai dan masyarakat di Desa Beloro.

Namun memang selama pengamatan dilapangan ada beberapa pegawai yang langsung turun tangan untuk menjalankan kegiatan tersebut dengan kemampuan yang seadanya. Hal ini menyebabkan kegiatan pelaksanaan PNPM kurang maksimal sehingga untuk mengatasi hal tersebut para perangkat desa saling bergantian dalam melaksanakan kegiatan PNPM ini agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal walaupun dengan kemampuan yang seadanya.

c. Komunikasi Antar Organisasi dan Petugas Pelaksana

Implementasi atau aplikasi sebuah acara kebijakan perlu dukungan dan koordinasi antar sesama stakeholder guna tercapainya baku dan tujuan kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat, maka akan semakin sedikit kesalahan-kesalahan yg terjadi. agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van meter pada Suharni, (2013:177) jalinan hubungan kerja sama sinergis diharapkan supaya instansi terkait untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. sebagai realitas berasal acara kebijakan maka diperlukan adanya korelasi yg baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi serta koordinasi.

saat wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya diketahui bahwa stakeholder yang menjalankan program PNPM di Desa Beloro ialah seluruh dinas yang terkait yang dikoordinasikan bersama Pemerintah Desa Beloro yang dibantu Oleh BPD serta masyarakat sekitar. Namun pelaksanaan program tersebut masih belum maksimal dikarenakan tidak adanya tim khusus (ahli) yang diturunkan untuk menjalankan program tersebut. Serta kurangnya komunikasi antara pembuat kebijakan dengan implementator program khususnya dari segi sosialisasi program, sehingga para implementator belum memahami sepenuhnya prosedur pelaksanaan dari program PNPM-Mandi Pedesaan di Desa Beloro.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat poly ditentukan oleh yang tepat dan cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan menggunakan konteks kebijakan yg akan dilaksanakan, di beberapa kebijakan dituntut pelaksana yang yang ketat dan disiplin pada aturan serta sanksi hukum, mirip halnya kebijakan publik yg bertujuan buat merubah sikap dasar insan. tetapi di konteks lain, dibutuhkan agen pelaksana yang demokratis serta persuasif.

ciri agen pelaksana dari Meter dan Horn (pada Subarsono, 2012:99) meliputi karakteristik organisasi yang akan memilih berhasil atau tidaknya suatu program, diantaranya kompetensi dan berukuran staf agen, dukungan legislatif serta eksekutif, kekuatan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi menggunakan pihak luar juga badan Produsen kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa karakteristik agen pelaksana program PNPM di Desa Beloro belum begitu terlihat. Hal tersebut dikarenakan para stakeholder

yang menjalankan program tersebut masih belum memahami secara menyeluruh bagaimana pengimplementasian program tersebut.

e. Kondisi Sosial, Lingkungan, Ekonomi

kondisi sosial, serta ekonomi pula sangat perlu buat diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yg ditawarkan Van Meter serta Van Horn artinya sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah pada memutuskan. kondisi sosial, politik dan ekonomi yg tidak kondusif dapat menjadi penyebab berasal kegagalan kinerja implementasi kebijakan. karena itu, upaya untuk menimplementasikan kebijakan wajib memerhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal tersebut.

Meter serta Horn (pada Subarsono, 2012:99) pula mengungkapkan imbas variabel lingkungan teradap implementasi program, antara lain asal daya ekonomi yg dimiliki organisasi pelaksana, bagaimana sifat opini publik, dukungan elit, kiprah, dan gerombolan -grup kepentingan dan swasta dalam menunjang keberhasilan acara.

Dilihat dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat sangat mendukung program PNPM tersebut. Hanya saja masih banyak warga masyarakat sekitar Desa Beloro yang belum mengetahui program PNPM itu sendiri. Dari sini dapat kita lihat bahwa perlunya Pemerintah Desa Beloro memberikan sosialisasi yang cukup untuk masyarakat agar masyarakat paham tentang program.

Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana yang diidentifikasi Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Suharno: 2013:177) yang mengatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan program PNPM di Desa Beloro dijalankan oleh implementator dengan tenaga kerja yang masih kurang memahami program tersebut. Dikarenakan tenaga kerja yang belum siap namun program harus sudah dijalankan.

Kendala Implementasi PNPM-MP dalam pembangunan Infrastruktur Desa Beloro

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM di Desa Beloro ialah masih kurangnya pemahaman yang dimiliki perangkat desa dan masyarakat sekitar terkait program tersebut. oleh karena itu, program yang menjadi tanggung jawab pemerintah Desa Beloro dijalankan tidak maksimal. Perlu adanya komunikasi yang mendalam antara para pemberi kebijakan kepada penerima kebijakan yaitu pemerintah Desa Beloro dengan mengadakan pelatihan terlebih dahulu sebelum impelentasi program. Dan mengenalkan program tersebut kepada masyarakat sekitar.

Selain itu hal yang menjadi kendala dalam pengimplementasian program tersebut yaitu kurang paham dan siapnya tenaga kerja. Dikarenakan tidak adanya tenaga kerja ahli atau tim pelaksana khusus untuk menjalankan program PNPM di

Desa Beloro itu sendiri. Kurang paham dan siapnya tenaga kerja yang menjalankan program tersebut, tentu sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu implementasi program kebijakan. Serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program tersebut dikarenakan masih sulitnya akses jalan sehingga kendaraan yang bermuatan untuk membawa bahan- bahan material harus melewati akses jalan yang jauh dan memakan waktu yang lama untuk sampai kedesa.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa program tersebut sudah dijalankan, namun program tersebut belum berjalan dengan maksimal. Kesimpulan penelitian ini difokuskan pada beberapa sub fokus yang dapat dirincikan sebagai berikut:
 - a. Standar dan sasaran kebijakan dari implementasi program PNPM di Desa Beloro ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Serta untuk mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Beloro, khususnya perbaikan jalan dan penerangan jalan menuju deasa Beloro
 - b. Sumberdaya yang mendukung berjalannya program PNPM di Desa Beloro masih kurang dan tidak didasarkan pada kriteria tertentu yang dikhususkan untuk menangani program tersebut.
 - c. Komunikasi antar organisasi dan petugas pelaksanaan dalam pelaksanaan program PNPM di desa Beloro masih kurang. Dikatakan demikian karena masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui tujuan dari program pembangunan tersebut.
 - d. Karakteristik agen pelaksana dari penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa para agen pelaksana masih belum sepenuhnya menjalankan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan program tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya agen pelaksana yang memahami program tersebut
 - e. Dari segi lingkungan ekonomi, sosial dalam pelaksanaan program sangat mendukung pelaksanaan program. Dimana setiap stakeholder yang terlibat tertib dalam menjalankan program, masyarakat menyambut baik pelaksanaan program tersebut.
 - f. Sikap para pelaksana dalam implementasi program PNPM di Desa Beloro tetap menjalankan program tersebut walaupun dalam keadaan yang belum siap dan belum memahami secara keseluruhan mengenai program PNPM.

Para Pelaksana berusaha menjalankan tugasnya dengan mengikuti alur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM di Desa Beloro ialah kurangnya pemahaman yang dimiliki perangkat desa dan masyarakat sekitar terkait program tersebut. Selain itu hal yang menjadi kendala dalam pengimplementasian program tersebut yaitu kurang paham dan siapnya tenaga kerja. Dikarenakan tidak adanya tenaga kerja ahli atau tim pelaksana khusus untuk menjalankan program PNPM di Desa Beloro itu sendiri. Serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan program tersebut dikarenakan masih sulitnya akses jalan dan penerangan jalan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala terkait dengan, oleh karena itu saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kurangnya pemahaman perangkat desa dan warga tentang program PNPM sebaiknya para perangkat desa yang menjadi pelaksana diberikan sosialisasi terlebih dahulu terkait program tersebut. Dan diberikan pelatihan kepada para perangkat desa dan warga sekitar yang bertanggung jawab untuk mensukseskan program PNPM dengan mengundang tenaga ahli.
2. Berkaitan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya program PNPM di Desa Beloro, sangat diharapkan Pemerintah Desa Beloro memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait program tersebut.
3. Berkaitan dengan masih sulitnya akses jalan dan penerangan jalan untuk menunjang pengiriman material infrastruktur, sebaiknya Pemerintah Desa Beloro mengutamakan untuk perbaikan jalan terlebih dahulu dan menambahkan lampu jalan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Idris, Adam. 2012. Dialektika Kebijakan Publik. Yogyakarta: Bimotry.
- Kadji, Yulianto. 2015. Formulasidan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: Universitas Gorontalo Press.
- Mardikanto, T. dan Poerwoko Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jakarta. (2007)
- Subarsono, AG. 2012. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teoridan Aplikasi).Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Suharno, Edi. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik:Kajian Proses dan Analisis Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Indonesia. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik – Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Banyu medi Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Yosua, Amir. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Bandung: Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara.